

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Masthuri. 2005. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: PT Pradyna Paramita.
- E. Fernando M. Manullang. 2016. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayana Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Husni Thamrin. 2013. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oka A. Yoeti. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- R. Soepomo. 2018. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Yrama Widya.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

### **Internet**

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id) diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 21.09 WIB

[www.tempatwisataunik.com](http://www.tempatwisataunik.com) diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 23.04 WIB.